

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam system politik Indonesia Pemerintah Aceh merupakan daerah yang daerah kesatuan yang tidak bisa secara utuh untuk membuat keputusan yang tanpa persetujuan pemerintah Pusat, walaupun Pemerintah Aceh merupakan daerah otonom, tetapi ada beberapa poin yang memang tidak bisa diputuskan sepihak.
2. Secara umum perihal penerapan kebijakan terkait Lambang dan Bendera Aceh hanya tinggal menunggu iktikad baik dari pemerintah pusat untuk tidak mempersullit atau meminta untuk merevisi Qanun nomor 3 tahun 2013 dengan harus mempertimbangkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2007, walalupun secara hiirarki hukum qanun masih dibawah determinasi Peraturan Pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas dapat disarankan bebrapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Aceh harus dengan segera mendesak pemerintah Pusat untuk memberikan hak dan wewenang terhadap polemik tentang qanun Lambang dan Bendera Aceh, agar tidak menimbulkan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada pemerintah Aceh jika sudah mempunyai landasan dan kepastian hukum yang jelas, sekiranya alngkah-langkah persuasif sudah bisa dlakukan dengan cara memberikan ide-ide kreatif sehingga masyarakat Aceh memiliki kejelasan terkait Lambang dan Bendera Aceh

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Prasetyo & Lina Miftanul Jannah ,(2005). “*Metode Penelitian Kuantitatif*”. Jakarta: Raja Grafindo
- Bungin Burhan, (2008), “*Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Kencana Prenada media group, hlm. 155 – 156.
- Haedar Akib (2020) “*Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*”
Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar, Volume 1 No.1
DOI: <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Hessel Nogi S. *Tangkilisan*,(2003). *Kebijakan Publik yang Membumi Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman offset, hal, 37.
- Moleong, J Lexy, (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, Hal 4,
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Fifth Edition. Boston: Pearson Education, ISBN:9781292020235, hlm, 56
- Pawito, (2007), “*Penelitian komunikasi kualitatif*,” Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksar, hlm: 84
- Serina Yanti (2019) “*Pandangan Masyarakat Gayo Terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lambang, Bendera, Dan Himne*” skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Jurnal/ Skripsi

- Agus Wahyono (2016) “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Besiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado*” Politeknik Negeri Manado, MAP (Jurnal Manajemen dan Administrsi Publik) Vol. 1 No. 2 ISSN 2615-2142, hlm, 183
- Arabiyani (2018) “*Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh*” *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Syiah Kuala Vol. 20, No. 2, -ISSN: 2527-8482. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11165>
- Devi Setyaningsih () “*Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)*” *Jurnal Privat Law* Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. VIII No. 2, ISSN: 2715-5676, hlm,177
- Kurniwan (2014) yang berjudul “*Aspek Hukum Pembentukan Qanun No. 3/2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh*” *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Syiah Kuala, No. 62, Th. XVI, ISSN: 0854-5499
- Muhammad Ridwansyah (2017) “*Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh*” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Universitas Gadjah Mada, Volume 7 Nomor 1, DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.109-126, hlm, 122
- Surya Murni Siregar, Isnaini (2017) “*Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (Add)*”

Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir” Jurnal Administrasi Publik Vol.6 No.2 ISSN: 2088-5278, hlm, 157
DOI: <https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.73>

Wisnu Sudarnoto (2015) “*Konflik Dan Resolusi*” jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I Universitas Islam Negeri Jakarta Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1459, DOI: [10.15408/sjsbs.v2i1.2236](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236), hlm, 3-6

Zaki, Ulya, 2014. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh" Jurnal Kontistusi Universitas Jabal Ghafur, Volume 11, Nomor 2, hlm, 386, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

Internet/Qanun

"Hasan Tiro visits Aceh's hero graves". *"Sunday schedule was a visit to the grave of Tiro's ancestor Tengku Cik Di Tiro, a national hero.* The Jakarta Post